

Intisari

Kehadiran *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di Libya secara jelas mengusung misi *peacekeeping* dan untuk mengantisipasi lebih banyak korban jatuh akibat konflik yang berkepanjangan di negara tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 yang ditetapkan secara resmi pada 18 Mei 2011 menegaskan mandat kepada NATO, yakni untuk menegakkan *no fly zone* di atas wilayah Libya. Kontroversi mulai terlihat ketika NATO bertindak memihak, memilih berseberangan terhadap kubu Moammar Khadafi. Keberpihakan NATO dan serangan-serangannya yang turut menjatuhkan korban sipil menyebabkan keadaan semakin rumit, mengingat ekspektasi dari masyarakat Libya dan dunia internasional terhadap organisasi internasional ini selama penempatannya di Libya.

Berangkat dari definisi hak asasi manusia, konsep, dan landasan utama penegakkan Hak Asasi Manusia, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kovenan sipil, ditemukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh NATO selama mengemban misinya di Libya. Pelanggaran tersebut merujuk pada kelalaian-kelalaian terhadap keselamatan penduduk sipil yang berupa hak untuk hidup dan mempertahankannya, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak, dan hak untuk bebas dari penyiksaan.